

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hak dan kewajiban kapal asing yang berlayar di perairan suatu negara telah diatur melalui beberapa instrument PerUndang-undangan yaitu UNCLOS 1982 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan dengan hak lintas damai di laut territorial Indonesia dengan memberikan hak kepada semua kapal dari semua negara, baik negara berpantai maupun negara tak berpantai untuk dapat menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia. Pada Pasal 12 ayat 1 PP No. 36 tahun 2002 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan skema pemisah lalu lintas dalam alur-alur laut untuk keselamatan pelayaran. Ayat 2 mewajibkan kepada kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam alur laut dimana telah ditetapkan skema pemisah lalu lintas tersebut untuk mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut.
2. Penangkapan kapal tanker MT Horse Iran dan MT Freya Panama terjadi karena pelanggaran atas hak lintas transit pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) karena telah mematikan sistem identifikasi *Automatic Identification System (AIS)* dan peraturan nasional Indonesia tentang kegiatan *STS Transhipment* tanpa izin dan di luar area yang diatur menurut undang-undang Indonesia, dan dua kapal tanker tersebut melakukan pemindahan minyak secara illegal dengan melanggar UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepebeanan dan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Selain itu dua kapal tanker tersebut juga menyembunyikan identitas kapal yang ditutup dengan kain dan jarring serta tidak mengibarkan bendera negaranya dengan melanggar UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua nakhoda kapal tanker

tersebut dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara, dan Kapten MT Frya Chen Yo Qun untuk membayar denda 2 miliar rupiah (US\$ 14.00) karena telah membuang minyak secara illegal di perairan Indonesia.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya sebagai negara kepulauan yang mempunyai yurisdiksi serta kedaulatan penuh atas laut territorialnya serta dalam penetapan alur lintas bagi kapal asing yang melalui laut territorial dan perairan kepulauan. Penetapan ini harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diusulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti *IMO (Internasional Maritime Organisation)* sebagai organisasi internasional. Selain itu Indonesia harus mengkaji ulang PP No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia terkait dengan kesesuaian dengan UNCLOS 1982, jika nantinya ditemukan ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional atau aturan yang dapat merugikan Indonesia yang dapat mengancam stabilitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat diantisipasi dengan secepatnya.
2. Pemerintah Indonesia perlu lebih menerapkan aturan atau pengawasan terhadap AIS kapal yang melintas di perairan Indonesia, serta pemerintah melalui BAKAMLA perlu memperketat pengawasan sehingga tidak ada kapal yang melanggar PP No. 36 tahun 2002 yang melintas di perairan Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Afriansyah, Arie. (2021). *Penegakkan Kedaulatandi Laut dan Navigasi Kapal Asing*. Depok: Universitas Indonesia
- Agoes, Etty R. (1991). *Konvensi Hukum Laut 1982 (Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing)*. Bandung: Abardin.
- Anwar, Chairul. (1989). *Horizon Baru Hukum Laut Internasional; Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan.
- Anwar, Khaiidir. (2014). *Hukum laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Fajar, Mukti dan Yanto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mujahid, Hadin, dan Nunuk Nuswardani. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Puspitawati, Dhiana. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinamo, Nomensen. (2010). *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktel*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Strake, J. (2008). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, D. (2013). *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

## **Peraturan Hukum**

*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi Internasional Mengenai Pencegahan Polusi Dari Kapal atau MARPOL 73/78

## **Sumber Lain**

Alarabiya News Team. (2021). *Iran Sanction Iran Asks Indonesia For Details on seizure of Tanker Accused of Illegal Oil Transfer.* <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/01/25/Iran-sanctions-Iran-asks-Indonesia-for-details-on-seizure-of-illegal-oil-transfer>.

Arie Afriansyah, S. M. (n.d.). *Penegakan Kedaulatan di Laut dan Navigasi Kapal Asing.* Jakarta: Law UI.

Arifin, C. (2021, Januari 27). *Tribun News.* Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/27/kronologi-penangkapan-2-kapal-tanker-berbendera-iran-dan-panama-jual-beli-minyak-di-pasar-gelap?page=2>

Bureau Veritas. (2020). *Ship Classification Oil Chemical Tanker.*

China Power Team. (2021, Desember 7). *How Much Trade Transits the South China Sea.* <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>

Hutagalung, siti Merida. (2017). *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia.* Jakarta: Jurnal Asia Pacific Studies

Indonesia, B. (2021, Januari 25). *BBC News Indonesia.* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55761108>

- Joko, Sulistyanto. (2014). *Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perikanan*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum.  
<http://doi.org/10.5281/zenodo.1256373>.
- Jurnal Maritim. (2021, Desember 18). *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982*.  
<https://jurnalmaritim.com/hak-lintas-kapal-asing-dalam-unclos-1982/>
- Maritim, J. (2021). Hak Lintas Kapal Asing dalam UNCLOS 1982.
- Mazrieva, E. (2021, Mei 30). *VoA Indonesia*. Retrieved from  
<https://www.voaindonesia.com/a/setelah-4-bulan-disita-tanker-iran-dan-panama-dibebaskan/5909710.html>
- Mizan. (2002). *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 Nomor 2*.
- Mohit. (2021, September 09). *Types of Ship*. Retrieved from What are Tanker Ships?:  
<https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-are-tanker-ships/>
- Mulyana, cahaya. (2021). *Sanksi Terhadap Kapal Tanker Iran dan Kapal Tanker Panama Segera Ditentukan*. <Https://media indonesia.com/politik-dan-hukum/387323/sanksi-terhadap-kapal-tanker-iran-dan-panamasegera-ditentukan>.
- msn. (2021, Mei 29). *msn Nasional*. Retrieved from <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/proses-hukum-selesai-indonesia-lepas-kapal-tanker-iran-dan-pa...>
- Reuters. (2021, Januari 25). *Reuters article*. Retrieved from  
<https://www.reuters.com/article/idUSKBN29U0UE?il=0>
- Tempo. (2021, Mei 30). *Dunia Tempo*. Retrieved from  
<https://dunia.tempo.co/read/1467173/indonesia-bebaskan-kapal-tanker-iran-mt-horse>
- The Maritime Executive. (2021). *Indonesia Fines and Expels Detained Iranian and Chinese Tankers*. <https://www.maritime-executive.com/article/indonesia-fines-and-expels-detained-iranian-and-chinese-tankers>.

United Nation Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (2021, November 27). *The United Nations Convention on the Law of The Sea (A Historical Perspective)*.

[https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention-historical-perspective.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention-historical-perspective.htm)

Wartsila. (2020). *Marine and Energy Technology*